



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2026**

PROVINSI GORONTALO



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

Jln. Jendral Sudirman No. 52 Kelurahan Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Tlp (0435) 821277 Gorontalo

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NOMOR : 029/ SPPP / / IV / 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025

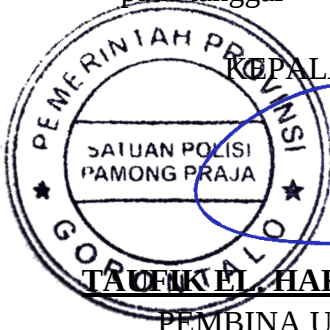
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaanya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a di atas, perlu membentuk Tim Penyusun RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaruasi Rancangan peraturan Daerah rentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoma Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026;
 - b. Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah;
 - c. Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Gorontalo.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal April 2025

KEPALA SATUAN

TAUFIK EL. HAKIM SIDIKI, SE. MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196809141997031005

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) 2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Taufik El. Hakim Sidiki, SE, MM	Kepala Satuan	Penanggung Jawab
2.	Ruly Lasulika, SE, MM	Sekretaris	Ketua
3.	Drs. Rivay Bumulo, M.Si	Kabid. Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Anggota
4.	Meni S. Doda, S.IP, MM	Plt. Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Anggota
5.	Agus Maliki, S.Pd, MM	Kabid. Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran	Anggota
6.	Yola Killis, S.Sos	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
7.	Azis Beiki, S.AP	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Mahmud Rizal Daipaha, S.STP	Kasie Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	Anggota
9.	Budiyanto Haluti, S.IP	Kasie Penyelidikan dan Penyidikan	Anggota
10.	Usman Taue	Kasie Patroli Pengamanan dan Pengawalan	Anggota
11.	Jasmin Mohamad, S.IP	Kasie Pemadam Kebakaran	Anggota
12.	Iswan A. Hasan, SE, MM	Kasie Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat	Anggota

KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI GORONTALO

TAUFIK EL. HAKIM SIDIKI, SE, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196809141997031005



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana Satpol PP diatur dalam Pasal 255 dan 256 tentang: "Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Daerah serta Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang RKPD Tahun 2026.

Berdasarkan Aturan diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dengan berpedomana pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJM dan RKPD.

Untuk mewujudkan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, diharapkan pemahaman akan Visi, Misi tugas dan tanggungjawab yang dilakukan sebagai Aparat Pemerintah, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat akan memudahkan kita dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan.

Rancangan Rencana Kerja ini kiranya menjadi Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD serta Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-OPD) Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bahan pembahasan RAPBD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dengan DPRD.

Gorontalo, Juli 2025

KEPALA SATUAN
POLSI PAMONG PRAJA
PROVINSI GORONTALO



DAUFIL EL. HAKIM SIDIKI, SE, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196809141997031005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistimatika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	23
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	37
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	37
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.....	39
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
BAB V PENUTUP.....	54



DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra.....	12
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo.....	20
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 2026 Provinsi Gorontalo Satuan Polisi Pamong Praja.....	28
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Provinsi Gorontalo.....	35
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana dan Kegiatan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju 2027 Provinsi Gorontalo.....	43
Tabel IV	Rencana Pendanaan Perangkat Daerah Satpol PP Provinsi Gorontalo.....	49



LAMPIRAN

1. Tabel Rekapitulasi RKA Belanja SKPD berdasarkan SIPD-RI
2. Tabel Formulir E. 29 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Satpol PP Provinsi Gorontalo Tahun 2026
3. Tabel Usulan Tambahan Rancangan Akhir Renja Tahun 2026



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan bentuk pelaksanaan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2026.

Selanjutnya Rencana Kerja ini menjadi bagian yang tak terpisahkan sekaligus merupakan proses penetapan kegiatan Tahunan pada Tahun 2026 beserta indikator kinerjanya sesuai dengan kebijakan, sasaran, Program dan kegiatan yang mengacu ke pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Gorontalo khususnya dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Peraturan Daerah serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka mendorong terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, perlu ditunjang dengan peningkatan sistem pertahanan, keamanan dan ketertiban dengan kebijakan yang diarahkan kepada peningkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, guna mendukung pelaksanaan hal tersebut diatas serta mendukung kelancaran pembangunan jangka menengah Provinsi Gorontalo.

Dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rancangan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2026 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum adalah memuat peraturan yang secara langsung terkait dengan penyusunan Rancangan Rencana Kerja OPD antara lain sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;



- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 315);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590); dan (Lampiran Permendagri Nomor 41);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Trantibum Linmas;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;



- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 25) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 26) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
- 28) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 29) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 30) Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- 31) Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2026 dimaksudkan untuk memenuhi regulasi kebijakan yang berkembang dalam peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya antara lain perubahan RPJMD Provinsi Gorontalo diikuti dengan perubahan RKPD Provinsi Gorontalo yang menjadi rujukan dalam penyusunan RENJA-



OPD sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun anggaran.
 - b. Mewujudkan keinginan dan kepastian pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah dan Pembangunan antara lain mengawal dan Menegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Meningkatkan Pemeliharaan Ketertiban, Ketenteraman dan Kenyamanan dalam Lingkungan Masyarakat, serta mewujudkan Perlindungan Masyarakat.
1. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo adalah :
- a. Menjabarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2026;
 - b. Sebagai acuan dalam penyusunan Renja Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangannya;
 - c. Mewujudkan efesiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dan saling bersinergi dalam peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

BAB I :

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berisi tentang Penyusunan Rancangan Akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2026 yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan pasal 255, 256 dan 257 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja untuk mendukung arah kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo antara lain peningkatan birokrasi dan kelembagaan.



1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD.

1.4. Sitematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Akhir Renja OPD, serta garis besar dokumen.

BAB II :

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berisi Evaluasi Rencana Strategis, Evaluasi Kinerja Renja OPD dan hasil Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Sampai dengan Tahun 2026.

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai PP No. 6 Tahun 2008 dan PP No. 38 Tahun 2007.

2. 3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

Isu strategis berkaitan dengan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo.

2. 4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD berdasarkan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap kesesuaian Rancangan Akhir dengan RKPD.



2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan masyarakat sepenuhnya diusulkan dari bidang teknis dan Sekretariat dilingkungan Satpol PP Provinsi Gorontalo melalui pelaksanaan kegiatan Forum OPD Satpol PP Provinsi Gorontalo dan Pokok Pikiran DPRD Provinsi Gorontalo yang kemudian diinput ke dalam Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III :

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai:

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV :

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V :

PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan.



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo Tahun 2024 terdiri dari 3 (Tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 21 (Dua Puluh) sub kegiatan, adalah sebagai berikut. :

Realisasi Program dan Kegiatan dan Capaian Kinerja :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan target capaian 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%, capaian ini dengan kategori Sangat Baik.
 - a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah, terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan antara lain :
 - Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan, target capaian 100 Laporan dengan capaian kinerja 100 Laporan dengan Persentase capaian sebesar 100%.
 - Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, target capaian 10 Lap dengan capaian kinerja 10 Lap dengan Persentase capaian sebesar 100%
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi, target capaian 1 Dokumen dengan capaian kinerja 1 Dokumen dengan Persentase capaian sebesar 100%.
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, target capaian 1 Dokumen dengan capaian kinerja 1 Dokumen dengan Persentase capaian sebesar 100%.
 - Sub Kegiatan Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termaksud dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa Hak Asasi Manuasia, target capaian 50 Orang dengan capaian kinerja 50 Orang dengan Persentase capaian sebesar 100%.



- Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan, target capaian 2 Dokumen dengan capaian kinerja 2 Dokumen dengan Persentase capaian sebesar 100%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Perda dan Perkada, target capaian 1 Dokumen dengan capaian kinerja 1 Dokumen dengan Persentase capaian sebesar 100%.
- b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan antara lain :
- Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, target capaian 16 Laporan dengan capaian kinerja 16 Laporan dengan Presentase capaian sebesar 100%.
 - Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, target capaian 6 Laporan dengan capaian kinerja 6 Laporan dengan Presentase capaian sebesar 100%.
 - Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS, target capaian 4 Laporan dengan capaian kinerja 0 Laporan dengan Presentase capaian sebesar 0%.
- c. Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan antara Lain :
- Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS, target capaian 1 Laporan dengan capaian kinerja 1 Laporan dengan Presentase capaian sebesar 100%.
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, target capaian 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%, capaian ini dengan kategori Sangat Baik.
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan antara lain :
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, target capaian 1 Dokumen dengan capaian kinerja 1 Dokumen dengan Presentase capaian sebesar 100%.
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan



Kabupaten/Kota, target capaian 50 Orang dengan capaian kinerja 50 Orang dengan Persentase capaian sebesar 100%.

- b. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan antara lain :

- Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, target capaian 30 Laporan dengan capaian kinerja 30 Laporan dengan Presentase capaian sebesar 100%.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, target capaian 100% dengan capaian kinerja 100%, capaian ini dengan kategori Sangat Baik.

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan antara lain :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target kinerja 5 Dokumen dengan capaian kinerja sebesar 5 Dokumen dengan Presentase capaian sebesar 100%.
- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja 3 Laporan dengan capaian kinerja sebesar 3 Laporan dengan Presentase capaian sebesar 100%.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan antara lain :

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target Kinerja 39 Orang dengan capaian kinerja sebesar 39 Orang dengan Presentase capaian sebesar 100%.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD, dengan target Kinerja 4 Laporan dengan capaian kinerja 4 Laporan, dengan Presentase capaian sebesar 100%.

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan antara lain :

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan target Kinerja 20 Orang dengan capaian kinerja sebesar 20 Orang, dengan Presentase capaian sebesar 100%.

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan antara lain :



- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target Kinerja 20 Paket dengan capaian kinerja sebesar 20 Paket dengan Presentase capaian sebesar 100%.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan antara lain :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target Kinerja 1 Laporan dengan capaian kinerja 1 Laporan, dengan Presentase capaian sebesar 100%.

2.1.1. Permasalahan dan solusi

A. Permasalahan :

1. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi ASN dalam memahami tujuan organisasi
2. Belum tersedianya pemetaan/ informasi tingkat kerawanan Trantibum.
3. Masih rendahnya pelaksanaan penegakan perda/perkada terutama bagi perda yang memuat sanksi.
4. Masih minimnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap Perda/Perkada.
5. Masih lemahnya peranan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membentuk Satlinmas.
6. Belum tersedianya Layanan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) dan kurangnya sosialisasi, komunikasi, informasi masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dimasyarakat.
7. Masih minimnya sosialisasi/edukasi terhadap masyarakat terhadap upaya pencegahan terjadinya kebakaran.
8. Masih minimnya sarana prasarana pemadam kebakaran serta penyajian data kejadian dan dampak kebakaran.

B. Solusi :

1. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Aparatur melalui bimtek dan pelatihan.
2. Penyusunan dokumen Peta Rawan Trantibum.
3. Merencanakan sosialisasi perda/perkada terhadap masyarakat di provinsi gorontalo.
4. Penguatan kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah



Kabupaten/kota dalam membentuk peran satlinmas.

5. Pemanfaatan layanan informasi kebakaran melalui media masa dan media elektronik.
6. Peningkatan sosialisasi/edukasi terhadap pencegahan terjadinya kebakaran.
7. Peningkatan sarana prasana Pemadam Kebakaran secara bertahap
8. peningkatan kualitas kompetensi aparaturnya pemadam kebakaran melalui Bimtek



Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Tahun Berjalan) Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo

Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023(n-3)	Target Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1					Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1	05				Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
1	05	02			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	100 Pelanggaran/Pengaduan	100%	100 Pelanggaran /Pengaduan	100 Pelanggaran/Pengaduan	100%	100 Pelanggaran/ Pengaduan	100 Pelanggaran/ Pengaduan	100%



Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023(n-3)	Target Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	100 Laporan	75 Lap	100 Laporan	100 Laporan	100%	100 Laporan	100 Laporan	100%
1	05	02	1.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	10 Laporan	8 Lap	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	10 Laporan	100%
1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	45 Org	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	4 Keg	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023(n-3)	Target Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1	05	02	1.01	05	Peningkatan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dimaksud dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	100 org	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	50 Orang	100%
1	05	02	1.01	06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	50 Prsnl	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1	05	02	1.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Dokumen	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan	18 Perda/Perkada	8 Perda/Perkada	16 Perda/Perkada	16 Perda/Perkada	100%	17 Perda/Perkada	17 Perda/Perkada	100%
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	18 Laporan	10 Kali	16 Laporan	16 Laporan	100%	17 Laporan	17 Laporan	100%
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	6 Laporan	6 Lap	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	6 Laporan	100%
1	05	02	1.03	02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	4 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah PPNS yang mendapatkan Pembinaan	50 Orang	50 Org	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	50 Orang	100%



Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023(n-3)	Target Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	50 Orang	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
1	05	04			Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran	100 %	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	05	04	1.01	04	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan,	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kab./Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	24 Kejadian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	05	04	1.01	09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	50 Orang		50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	50 Orang	100%
1	05	04	1.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	100%	30 Laporan	30 Laporan	100%
1	05	04	1.02	02	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	100%	30 Laporan	30 Laporan	100%



Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023(n-3)	Target Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
01					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
01	1	01			Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Laporan Evaluasi	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
01	1	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dok	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
01	1	01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1 Dok	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
01	1	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
01	1	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/Bulan		39 Orang/Bulan	39 Orang/Bulan	100%	39 Orang/Bulan	39 Orang/Bulan	100%
01	1	02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Koodinasi Penyusunan aporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Laporan	1 Dok	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%



Kode					Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, dan Keluaran Kegiatan s.d dengan tahun 2023(n-3)	Target Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
01	1	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	20 Orang	20 Orang	100%
01	1	05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Org	20 Orang	20 Orang	100%	20 Orang	20 Orang	100%
01	1	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	20 Paket	20 Jenis	20 Paket	20 Paket	100%	20 Paket	20 Paket	100%
01	1	06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Jenis	20 Paket	20 Paket	100%	20 Paket	20 Paket	100%
01	1	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
01	1	08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja
Provinsi Gorontalo


TASEIK EL-HAKIM SIDIKI, SE, MM
NIP. 196809141997031005



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo.

Analisis kinerja pelayanan OPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra OPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

mempunyai tugas pokok menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo yaitu sebagai berikut :

❖ Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman, penegakan peraturan perundang-undangan, perlindungan masyarakat dan kebakaran untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan.

❖ Fungsi

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman, menegakan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah serta Perlindungan Masyarakat;
2. Menyusun program pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur;
3. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman di daerah;
4. Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Melaksanakan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan dan pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
6. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
8. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Guna melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dalam perumusan kebijakan teknis, harus melaksanakan sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kebakaran Provinsi Gorontalo



melaksanakan penegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sesuai dengan wewenanganya, pengawasan dilakukan dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Hal ini dilaksanakan mengingat masih tingginya pelanggaran Peraturan Daerah, baik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, badan hukum maupun masyarakat Tabel T-C.30 menjelaskan pencapaian kinerja pelayanan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.



Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Satpol PP Provinsi Gorontalo

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan			100 Kasus	100 Laporan	100 Laporan						
2	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			10 Kasus	10 Laporan	10 Laporan						
3	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
4	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
5	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja			50 Orang	50 Orang	50 Orang						
6	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen						
7	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Warga yang terkena dampak akibat dari penegakan Perda		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan						
8	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			16 Laporan	17 Laporan	8 Laporan						



No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
9	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP			6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan						
10	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan						
11	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen						
12	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kab./Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
13	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota			50 Orang	50 Orang	50 Orang						
14	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			30 Laporan	30 Laporan	60 Laporan						
15	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen						
16	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan						
17	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			39 Orang/Bulan	39 Orang/Bulan	37 Orang/Bulan						



No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
18	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Koodinasi Penyusunan aporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan						
19	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	10 Orang						
20	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	10 Paket						
21	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan						
22			Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani									
23			Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan									
24			Jumlah Satlinmas yang terlatih dan di kukuhkan									
25			Jumlah Sarana Prasana Minimal yang di Penuhi									
26			Jumlah SOP dalam Penegakan Perda dan Perkada serta Penanganan Gangguan Trantibum		6 SOP							
27			Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualitas PPNS	6 PPNS	6 PPNS							



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provsu adalah menyangkut kondisi keamanan, ketenteraman, ketertiban serta perlindungan masyarakat di wilayah Provinsi Gorontalo terkait permasalahan permasalahan seperti penyalahgunaan izin, pelanggaran peraturan, kejadian politik praktis/aksi unjuk rasa dan lain sebagainya.

Untuk itu, sebagai salah satu OPD yang membidangi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya meliputi; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diamanatkan dalam pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Provsu memiliki tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dimana potensi konflik dan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat tinggi. Karena pada hakikatnya, "Kepala Daerah mempunyai tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat" sebagaimana diamanatkan dalam pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kondisi tersebut, seyogianya harus dibarengi dengan kapasitas kelembagaan yang utuh, dukungan sumber daya yang mumpuni dan anggaran yang memadai agar Satpol PP Provinsi Gorontalo dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam rangka menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Namun demikian, terdapat sejumlah permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP Provinsi Gorontalo dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan organisasi dimaksud antara lain:

1. Terbatasnya jumlah personil polisi pamong praja yang tidak sebanding dengan tingginya tingkat permasalahan yang harus dihadapi.
2. Kurangnya pelatihan dan pembinaan teknis bagi Personil Satpol PP, Linmas dan Pemadam Kebakaran
3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi aparatur;
4. Belum optimalnya koordinasi dan kurangnya dukungan dari instansi terkait dalam penegakan peraturan daerah;
5. Terbatasnya jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo;
6. Belum meratanya pemahaman tugas pokok dan fungsi aparat Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;



7. Belum optimalnya sistem penegakan perda secara preventif (pendekatan masyarakat) untuk membangun kesadaran hukum masyarakat dikarenakan upaya penegakan perda yang dilakukan selama ini masih bersifat represif sehingga banyak menimbulkan banyak perlawanan dan penolakan dari masyarakat;

Berkaitan dengan isu-isu penting serta kendala permasalahan yang akan dihadapi, maka diformulasikan dalam bentuk rekomendasi strategis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Gorontalo, sebagai berikut:

A. Kekuatan (*Strenght*). Internal

1. Adanya Standart operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan kerja,
2. Adanya layanan aduan online maupun offline

B. Kelemahan (*Weakness*)

1. Masih banyak pegawai yang kurang berkompeten karena banyak pegawai yang belum mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat ahli
2. Sarana dan Prasarana masih kurang.
3. Belum atersedianya Peta Kerawanan Gangguan Kententraman dan Ketertiban umum
4. Belum terbentuknya Sekretariat PPNS

C. Peluang (*Opportunities*)

1. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi termasuk teknologi informasi dan komunikasi yang dapat dipergunakan untuk mempermudah, empercepat dan meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan Masyarakat
2. Adanya kerja sama antar Satpol PP Provinsi Gorontalo dengan Kabupaten/Kota
3. Adanya Kerja Sama antar Pemadam Kebakaran Provinsi dengan Kabupaten/Kota

D. Ancaman (*Threats*).

1. Terjadinya Konflik dan bentrok antar petugas dan Masyarakat saat pelaksanaan penertiban
2. Terjadinya bencana kebakaran dan non kebakaran yang tidak tertagani.

E. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catat yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

Isu-isu penting yang perlu di tindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur melalui kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional, Penguatan kelengkapan peralatan Satpol PP Provinsi Gorontalo, pengadaan peralatan pencegahan kebakaran.
2. Meningkatkan koordinasi serta melakukan upaya kerjasama antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Perda melalui kegiatan Penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daaerah serta Peraturan Perundang-



Undangan lainnya, Rapat-rapat koordinasi secara berkala tentang penegakan Perda dan Perkada yang bermasalah di Provinsi Gorontalo, Koordinasi penegakan Perda dan Perkada dengan instansi terkait di Kab/Kota.

3. Menambah jumlah PPNS melalui usulan Diklat PPNS di lingkungan Satpol PP Provinsi Gorontalo.
4. Mengoptimalkan peningkatan kemampuan ketrampilan dan kesamaptaan anggota Polisi Pamong Praja melalui Diklat Dasar Polisi Pamong Praja dan pelatihan kesamptaan.
5. Mengoptimalkan/Pembentukan Sekretariat PPNS.
6. Mengoptimalkan peningkatan kemampuan ketrampilan dan kesamaptaan anggota Pemadam Kebakaran melalui Diklat Pemadam Kebakaran.
7. Memaksimalkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan trantibum dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat.
8. Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Satlinmas melalui kegiatan Pelaksanaan Jambore, Penilaian Pos Kamling di Kabupaten/Kota. Serta uji ketangkasan bagi aparat satuan linmas dalam kesiapsiagaan menghadapi gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan bencana alam.

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Bahwa pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2026, prioritas program yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo yang tentunya menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan rencana kerja OPD Tahun 2026. Untuk Rencana Kerja Tahun 2026 terdapat rumusan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja 2026 mengingat bahwa ke 26 (Dua Puluh Enam) sub kegiatan sebagai sangat penting guna menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi secara maksimal.

A. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi
 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan



- Pemberdayaan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
 - Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja
 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi
2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
- Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada
 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
3. Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
- Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum
- B. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
4. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
- Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan
5. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- C. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
6. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



7. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
8. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
9. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Renstra OPD, maka Satuan Polisi Pamong Praja mengajukan 3 program yang terdiri dari 10 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan. Dari usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang masuk ke dalam RKPD tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik. Berikut table T-C.31 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 Provinsi Gorontalo :



Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 2026
Provinsi Gorontalo
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Rancangan Akhir RKPD 2026					Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				10,631,220,615					13,361,187,200
I	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi Gorontalo	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	694,386,309	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi Gorontalo	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	1,455,000,000
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	50 Pelanggaran/Pengaduan	396,000,000	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	50 Pelanggaran/Pengaduan	845,000,000
a	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi		Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	1 Dokumen	15,000,000	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi		Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	1 Dokumen	40,000,000
b	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	24,000,000	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	45,000,000
c	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	10 Laporan	20,000,000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	10 Laporan	80,000,000
d	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	100 Laporan	190,000,000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	100 Laporan	350,000,000



No	Rancangan Akhir RKPD 2026					Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
e	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	1 Laporan	62,000,000	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat		Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	1 Laporan	90,000,000
f	Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi		Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	1 Laporan	35,000,000	Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi		Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	1 Laporan	105,000,000
g	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	50 Orang	50,000,000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	50 Orang	90,000,000
h	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	50,000,000
2.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Provinsi Gorontalo	Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan	8 Perda/Perkada	278,386,309	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Provinsi Gorontalo	Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan	8 Perda/Perkada	535,000,000
i.	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	8 Laporan	209,386,309	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	8 Laporan	260,000,000
j	Sub Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Laporan	13,000,000	Sub Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Laporan	55,000,000
k	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	6 Laporan	43,000,000	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	6 Laporan	110,000,000



No	Rancangan Akhir RKPD 2026					Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Sub Kegiatan Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada		Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	1 Dokumen	13,000,000	Sub Kegiatan Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada		Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	1 Dokumen	50,000,000
m	Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	4 Dokumen		Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	4 Dokumen	60,000,000
3	Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah PPNS yang mendapatkan Pembinaan	50 Orang	20,000,000	Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah PPNS yang mendapatkan Pembinaan	50 Orang	75,000,000
n	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	20,000,000	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	75,000,000
II	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelematan Non Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Persentase Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran	100 %	71,000,000	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelematan Non Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Persentase Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran	100 %	256,000,000
4	Kegiatan Penyelenggaran Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	33,000,000	Kegiatan Penyelenggaran Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	176,000,000
o	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	11,000,000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	50,000,000



No	Rancangan Akhir RKPD 2026					Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
p	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Dokumen	22,000,000	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 Dokumen	76,000,000
q	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota		Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	50 Orang	0	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota		Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	50 Orang	50,000,000
r	Sub Kegiatan Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	1 Dokumen	0	Sub Kegiatan Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	1 Dokumen	40,000,000
5.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, Pembinaan, Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	30 Laporan	38,000,000	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, Pembinaan, Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	30 Laporan	80,000,000
s	Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	30 Laporan	38,000,000	Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	30 Laporan	80,000,000
III	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Satpol PP	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	9,865,834,306	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Satpol PP	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	11.650.187.200
6.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Laporan Evaluasi	8 Dokumen	20,000,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Laporan Evaluasi	8 Dokumen	100.000.000
t	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	10,000,000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	55,000,000
u.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	10,000,000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	45,000,000



No	Rancangan Akhir RKPD 2026					Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5,139,187,200	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5.205.187.200
v	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	5,107,187,200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	5.107.187.200
w	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Koodinasi Penyusunan aporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Laporan	32,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Koodinasi Penyusunan aporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Laporan	98.000.000
8.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	81,728,000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	549.568.698
x	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satpol PP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	81,728,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satpol PP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	180.000.000
9.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	10 Paket	303,111,000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	10 Paket	540.000.000
y	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	303,111,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	540.000.000
10.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.321,808,106	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.625.000.000
z	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.321,808,106	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.625.000.000
					10,631,220,615					13,361,187,200

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja TA. 2026, Satuan Polisi Pamong Praja telah memperhatikan dan menelaah usulan, masukan maupun rekomendasi program/ kegiatan dari semua pihak terkait, baik Satuan Polisi Pamong Praja Kab/ Kota, DPRD Provinsi Gorontalo, akademisi, dan stakeholder.

Beberapa point penting dari telaah usulan program/kegiatan dalam penyusunan Renja TA. 2026 adalah:

1. Dari unsur Satpol PP Kab/Kota adalah terkait kebutuhan prasarana penunjang operasional aparatur, terutama Satpol PP Kab/Kota yang alokasi anggarannya masih kecil, agar bisa difasilitasi dan diakomodir oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo.
2. Kegiatan untuk Membentuk Satgas Linmas Tingkat Provinsi.
3. Melaksanakan Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
4. Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada.
5. Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
6. Dalam rangka peningkatan capacity building sumber daya manusia Satpol PP dan Linmas Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo dipandang perlu dilaksanakan latihan gabungan Satpol PP Provinsi Gorontalo bersama Satpol PP Kab/Kota secara terpusat.
7. Untuk meningkatkan kesadaran bela negara bagi aparat Satpol PP dan Linmas Kab/Kota dipandang perlu dilaksanakan Jambore/Apel Siaga antara Satpol PP dan Linmas se-Provinsi Gorontalo.
8. Untuk meningkatkan sumber daya aparatur Satpol PP dan Linmas diperlukan Memorandum Of Understanding (MOU) antara Satpol PP Provinsi Gorontalo, Satpol PP Kab/Kota, dengan instansi vertikal terkait (TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Basarnas, dan BNN).
9. Dalam rangka penegakan Perda Provinsi Gorontalo maupun Perda Kabupaten/Kota perlu dilakukan MoU antara Gubernur Gorontalo dengan Bupati / Walikota se-Provinsi Gorontalo agar lebih sinergitas demi terciptanya koordinasi dan kerjasama yang lebih baik guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
10. Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota, diharapkan intensitas pertemuan atau rapat lebih ditingkatkan. Daftar usulan/ masukan maupun rekomendasi tersebut dilakukan proses sinkronisasi dengan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan analisis kondisi strategis yang kemudian menjadi bahan/ acuan untuk penyusunan rencana kerja selanjutnya.



Dari hal tersebut, berdasarkan skala prioritas dan kesesuaian tupoksi serta kondisi lapangan yang dihadapi dengan mempertimbangkan kebutuhan anggaran dan pendanaan, proses akomodatif usulan/ masukkan tersebut dilaksanakan untuk selanjutnya menjadi bahan masukan atau acuan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja menentukan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2026. Daftar usulan/masukkan dapat dilihat pada Tabel Tabel T-C.32 sebagaimana terlampir



Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Provinsi Gorontalo

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi Gorontalo	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani		
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani		
a	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Provinsi Gorontalo	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		
b	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
c	Sub Kegiatan Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur		
2	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Provinsi Gorontalo	Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan		
d	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
e	Sub Kegiatan Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda		
f	Sub Kegiatan Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada		



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
II	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi Gorontalo	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas		
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan		
g	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
h	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
i	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan

➤ Arah dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan latar belakang keterkaitan masalah dan tantangan, maka arah dan kebijakan Renstra yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut :

➤ STRATEGI

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Misi Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang akan dijalankan berdasarkan permasalahan dan kewenangan, yaitu :

- 1) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme pelayanan trantibumlinmas
- 2) Pemerataan cakupan pelayanan tranitbumlinmas hingga ke wilayah administrative provinsi, terutama daerah perbatasan, terpencil atau rawan konflik sosial
- 3) Penguatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan
- 4) Penguatan sistem pengawasan dan monitoring pelaksanaan penegakan perda/perkada
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran
- 6) Optimalisasi operasi penegakan perda di lapangan secara terkoordinasi dan humanis
- 7) Sosialisasi dan edukasi perda kepada masyarakat secara massif dan berkelanjutan
- 8) Penegakan perda/perkada berbasis zona risiko dan potensi pelanggaran hukum
- 9) Penguatan peran dan fungsi satuan perlindungan masyarakat terhadap potensi gangguan tranitbum di kabupaten/kota.
- 10) Optimalisasi sosialisasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

➤ ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah

ditetapkan. Berikut ini kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo 2025-2029:

1. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pengawasan Penegakan Perda dan Perkada dalam rangka menjaga kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Kerja Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo yaitu **"Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat"**.

b. Sasaran Renja

Sasaran pokok Rencana Kerja yang akan dicapai yaitu **"Meningkatnya Layanan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat"**.

3. 3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai hingga akhir tahun 2026, Maka dirumuskan kedalam beberapa program dan kegiatan prioritas berdasarkan urusan yang sifatnya strategis dengan pagu indikatif sebesar Rp.**10,631,220,615.-** yang membiayai 3 Program, 10 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Program ini bertujuan untuk pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 694.386.309, yang membiayai 3 (Tiga) kegiatan dan 14 (Empat Belas) Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan pagu indikatif sebesar Rp.396.000.000.-
 - Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 15.000.000.-
 - Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 24.000.000.-
 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 20.000.000.-

- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Paroli, Pengamanan dan Pengawalan, dengan pagu indikatif sebesar Rp.190.000.000.-
 - Pemberdayaan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 62.000.000.-
 - Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 35.000.000.-
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 50.000.000.-
 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi, dengan pagu indikatif sebesar Rp.0.-
2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 278.386.309.-
- Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 209.386.309.-
 - Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 13.000.000.-
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 43.000.000.-
 - Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 13.000.000.-
 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 0.-
3. Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 20.000.000,-
- Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum, dengan pagu indikatif sebesar Rp.20.000.000.-

B. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini bertujuan untuk menangani terjadinya kebakaran rumah pemukiman warga, pertokoan atau kebakaran hutan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 71.000.000.-, yang membiayai 2 (Dua) kegiatan dan 5 (Lima) Sub Kegiatan yaitu :

4. Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 33.000.000.-

- Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 11.000.000.-
- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 22.000.000.-
- Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 0.-
- Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 0.-

5. Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 38.000.000.-

- Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 38.000.000.-

C. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi Sarana Prasarana, kualitas Sumber Daya Aparatur yang ada, Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja OPD, serta penataan Sistem Pengadministrasian dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi secara regular sebagai wujud pemerintahan yang baik, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 9.865.834.306.- yang membiayai 5 (Lima) Kegiatan dan 7 (Tujuh) Sub Kegiatan yaitu:

6. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 20.000.000.-
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 10.000.000.-
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 10.000.000.-
7. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.139.187.200.-
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 5.107.187.200.-
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 32.000.000.-
8. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 81.728.000.-
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 81.728.000.-
9. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 303.111.000.-
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 303.111.000.-
10. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.321.808.106.-
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan pagu indikatif sebesar Rp. 4.321.808.106.-

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan perkiraan maju Tahun 2026 diuraikan pada tabel T-C.33 berikut:



Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026
dan Perkiraan Maju 2027
Provinsi Gorontalo

NAMA PERANGAKAT DAERAH : SATPOL PP PROVINSI GORONTALO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Provinsi Gorontalo		10,631,220,615				13,361,187,200
I	Program	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi Gorontalo	100%	694,386,309	APBD	Program Rutin	100%	1,455,000,000
	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
1.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	Provinsi Gorontalo	50 Pelanggaran/Pengaduan	396,000,000		Kegiatan Rutin	50 Pelanggaran/Pengaduan	845,000,000
a	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur		1 Dokumen	15,000,000		Sub Kegiatan Baru	1 Dokumen	40,000,000
b	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada		1 Laporan	24,000,000		Sub Kegiatan Rutin	1 Laporan	45,000,000
c	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		10 Laporan	20,000,000		Sub Kegiatan Rutin	10 Laporan	80,000,000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		100 Laporan	190,000,000		Sub Kegiatan Rutin	100 Laporan	350,000,000
e	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat		1 Laporan	62,000,000		Sub Kegiatan Rutin	1 Laporan	90,000,000
f	Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah		1 Dokumen	35,000,000		Sub Kegiatan Rutin	1 Dokumen	105,000,000
g	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas		50 Orang	50,000,000		Sub Kegiatan Rutin	50 Orang	90,000,000
h	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		1 Dokumen	0		Sub Kegiatan Rutin	1 Laporan	50,000,000
2.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan	Provinsi Gorontalo	8 Perda/Perkada	278,386,309		Kegiatan Rutin	8 Perda/Perkada	535,000,000
i	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		8 Laporan	209,386,309		Sub Kegiatan Rutin	8 Laporan	260,000,000
j	Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda		1 Laporan	13,000,000		Sub Kegiatan Baru	1 Laporan	55,000,000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
k	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP		6 Laporan	43,000,000		Sub Kegiatan Rutin	6 Laporan	110,000,000
l	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada		1 Dokumen	13,000,000		Sub Kegiatan Baru	1 Dokumen	50,000,000
m	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda		4 Dokumen	0		Sub Kegiatan Rutin	4 Dokumen	60,000,000
3.	Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah PPNS yang mendapatkan Pembinaan	Provinsi Gorontalo	50 Orang	20,000,000		Kegiatan Rutin	50 Orang	75,000,000
n	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		1 Laporan	20,000,000		Sub Kegiatan Rutin	1 Laporan	75,000,000
II	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran	Provinsi Gorontalo	100%	71,000,000	APBD	Program Rutin	100%	256,000,000
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	33,000,000		Kegiatan Rutin	1 Dokumen	176,000,000
o	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kab./Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		1 Dokumen	11,000,000		Sub Kegiatan Rutin	1 Dokumen	50,000,000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		1 Dokumen	22,000,000		Sub Kegiatan Baru	1 Dokumen	76,000,000
q	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)		50 Orang	0		Sub Kegiatan Rutin	50 Orang	50,000,000
r	Sub Kegiatan Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid		1 Dokumen	0		Sub Kegiatan Baru	1 Dokumen	40,000,000
4.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Gorontalo	30 Laporan	38,000,000		Kegiatan Rutin	30 Laporan	80,000,000
s	Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		30 Laporan	38,000,000		Sub Kegiatan Rutin	30 Laporan	80,000,000
III	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Gorontalo	100%	9,865,834,306	APBD	Program Rutin	100%	11.650.187.200
5.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Laporan Evaluasi	Satpol PP	8 Dokumen	20,000,000		Kegiatan Rutin	8 Dokumen	100.000.000
t	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	10,000,000		Sub Kegiatan Rutin	5 Dokumen	55,000,000
u	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	10,000,000		Sub Kegiatan Rutin	3 Laporan	45,000,000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	4 Laporan	5,139,187,200		Kegiatan Rutin	4 Laporan	5.205.187.200
v	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		37 Orang/Bulan	5,107,187,200		Sub Kegiatan Rutin	37 Orang/Bulan	5.107.187.200
w	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Koodinasi Penyusunan aporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		4 Laporan	32,000,000		Sub Kegiatan Rutin	4 Laporan	98.000.000
7.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Satpol PP	10 Orang	81,728,000		Kegiatan Rutin	10 Orang	549.568.698
x	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang	81,728,000		Sub Kegiatan Rutin	10 Orang	180.000.000
8.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Satpol PP	10 Paket	303,111,000		Kegiatan Rutin	10 Paket	540.000.000
y	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10 Paket	303,111,000		Sub Kegiatan Rutin	10 Paket	540.000.000
9.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Satpol PP	1 Laporan	4.321,808,106		Kegiatan Rutin	1 Laporan	5.625.000.000
z	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	4.321,808,106		Sub Kegiatan Rutin	1 Laporan	5.625.000.000
					10,631,220,615				13,361,187,200

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Gorontalo, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo adalah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang – undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

Sejalan dengan Misi Provinsi Gorontalo, Mewujudkan Pemerintah Daerah Gorontalo yang Amanah, maka program dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo Tahun 2026 terdiri atas 3 (tiga) program dan 10 (Sepuluh) kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) Sub Kegiatan dengan jumlah pagu indikatif sebesar Rp. 10.631.220.615,00. Rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel IV sebagai berikut :



Tabel IV
Rencana Pendanaan Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Gorontalo

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				OPD
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Provinsi Gorontalo		10,631,220,615		
I	Program	Persentase Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Provinsi Gorontalo	100%	694,386,309	APBD	Satpol PP
	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
1.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	Provinsi Gorontalo	50 Pelanggaran /Pengaduan	396,000,000		
a	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur		1 Dokumen	15,000,000		
b	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada		1 Laporan	24,000,000		
c	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		10 Laporan	20,000,000		
d	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		100 Laporan	190,000,000		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				OPD
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
e	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat		1 Laporan	62,000,000		
f	Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah		1 Dokumen	35,000,000		
g	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas		50 Orang	50,000,000		
h	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		1 Dokumen	0		
2.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan	Provinsi Gorontalo	8 Perda/Perkada	278,386,309		
i	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		8 Laporan	209,386,309		
j	Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda		1 Laporan	13,000,000		
k	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP		6 Laporan	43,000,000		
l	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada		1 Dokumen	13,000,000		
m	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda		4 Dokumen	0		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				OPD
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Kegiatan Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah PPNS yang mendapatkan Pembinaan	Provinsi Gorontalo	50 Orang	20,000,000		
n	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		1 Laporan	20,000,000		
II	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana kebakaran	Provinsi Gorontalo	100%	71,000,000	APBD	
4.	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Provinsi Gorontalo	1 Dokumen	33,000,000		
o	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kab./Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		1 Dokumen	11,000,000		
p	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		1 Dokumen	22,000,000		
q	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)		50 Orang	0		
r	Sub Kegiatan Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid		1 Dokumen			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				OPD
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan, Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Provinsi Gorontalo	30 Laporan	38,000,000		
s	Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		30 Laporan	38,000,000		
III	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Gorontalo	100%	9,865,834,306	APBD	
6.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Laporan Evaluasi	Satpol PP	8 Dokumen	20,000,000		
t	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5 Dokumen	10,000,000		
u	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3 Laporan	10,000,000		
7.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	4 Laporan	5,139,187,200		
v	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		37 Orang/Bulan	5,107,187,200		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2026				OPD
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
w	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Koodinasi Penyusunan aporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		4 Laporan	32,000,000		
8.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Satpol PP	10 Orang	81,728,000		
x	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang	81,728,000		
9.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Satpol PP	10 Paket	303,111,000		
y	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10 Paket	303,111,000		
10.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Satpol PP	1 Laporan	4.321,808,106		
z	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	4.321,808,106		
					10,631,220,615		



BAB V
PENUTUP

4. 1. Catatan penting yang mendapatkan perhatian

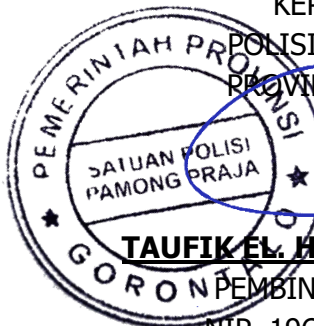
Didalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat untuk Tahun 2026 ini, ada beberapa kegiatan yang anggaran belanjanya ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan karena dianggap urgen atau penting sehubungan dengan peningkatan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

4. 2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Didalam pelaksanaan Program dan kegiatan tersebut diatas, dilaksanakan berdasarkan satuan anggaran yang tersedia serta aturan–aturan yang berlaku atau berkenaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Demikian RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2026 ini dibuat untuk bisa dijadikan sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Atas segala kekurangan dalam hal penyajian penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 ini, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Atas saran dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Gorontalo, Juli 2025

KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI GORONTALO



TAUFIK EL. HAKIM SIDIKI, SE, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196809141997031005

LAMPIRAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH												REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD			
Pemerintahan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026															
Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja															
Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan															
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah							
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)		
Satuan Polisi Pamong Praja															
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Rp. 694.386.309	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 694.386.309		
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				Rp. 396.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 396.000.000		
1	05	02	1.01	0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 15.000.000		
1	05	02	1.01	0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa		Rp. 24.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 24.000.000		
1	05	02	1.01	0020	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.000.000		
1	05	02	1.01	0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa		Rp. 190.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 190.000.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	05	02	1.01	0022	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa		Rp. 62.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 62.000.000	
1	05	02	1.01	0023	Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa		Rp. 35.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 35.000.000	
1	05	02	1.01	0024	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa		Rp. 50.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000	
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur				Rp. 278.386.309	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 278.386.309	
1	05	02	1.02	0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa		Rp. 209.386.309	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 209.386.309	
1	05	02	1.02	0010	Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa		Rp. 13.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 13.000.000	
1	05	02	1.02	0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa		Rp. 43.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 43.000.000	
1	05	02	1.02	0013	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa		Rp. 13.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 13.000.000	
1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi				Rp. 20.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.000.000	
1	05	02	1.03	0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.000.000	
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				Rp. 71.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 71.000.000	
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran				Rp. 33.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 33.000.000	
1	05	04	1.01	0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa		Rp. 11.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 11.000.000	
1	05	04	1.01	0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa		Rp. 22.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 30.742.600	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	05	04	1.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				Rp. 38.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 38.000.000	
1	05	04	1.02	0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa		Rp. 38.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 38.000.000	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Rp. 9.848.223.306	Rp. 17.611.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 9.865.834.306	
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 20.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.000.000	
1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.000.000	
1	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.000.000	
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 5.139.187.200	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.139.187.200	
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa		Rp. 5.107.187.200	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 5.107.187.200	
1	05	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa		Rp. 32.000.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 32.000.000	
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 81.728.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 81.728.000	
1	05	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa		Rp. 81.728.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 81.728.000	
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 285.500.000	Rp. 17.611.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 303.111.000	
1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa		Rp. 285.500.000	Rp. 17.611.000	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 303.111.000	
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 4.321.808.106	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.321.808.106	

LAMPIRAN II

Formulir E.29
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renja Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Gorontalo
Tahun 2026

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja Perangkat Daerah provinsi.	✓			
2	Pengolahan data dan informasi	✓			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah	✓			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah provinsi tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah provinsi.	✓			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	✓			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD provinsi	✓			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8	Penelaahan usulan masyarakat.		✓	Tidak ada usulan dari masyarakat	Melakukan Rapat Forum dengan Satpol PP Kab/kota serta melibatkan tokoh masyarakat
9	Perumusan kegiatan prioritas	✓			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah provinsi.	✓			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kabupaten/kota.	✓			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi.	✓			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	✓			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi sesuai surat edaran Gubernur.	✓			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah provinsi disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	✓			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan evaluasi		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Kesesuaian			
		Ada	Tidak Ada		
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah provinsi.	✓			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah provinsi telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	✓			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah provinsi yang telah disyahkan.	✓			

Gorontalo, Juli 2025

KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI GORONTALO



TAUFIK EL HAKIM SIDIKI, SE, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196809141997031005

LAMPIRAN III

DAFTAR USULAN AKTIVITAS PRIORITAS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Provinsi Gorontalo	100 Laporan	Rp. 707,310,000	
				Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Provinsi Gorontalo	10 Laporan	Rp. 83,974,000	
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Provinsi Gorontalo	1 Laporan	Rp. 243,017,000	Sekretariat PPNS
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		1 Dokumen	Rp. 50,000,000	
				Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda		4 Dokumen	Rp. 50,000,000	
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi Gorontalo	50 Orang	Rp. 90,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Sub Kegiatan Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid		1 Dokumen	Rp. 30,000,000		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Satpol PP	1 Laporan	Rp. 16,150,000,000		- Pembangunan Gedung Kantor 16.000.000.000 - Hanggar Rp. 150.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Satpol PP	20 Paket	Rp. 2,850,000,000		- Kendaraan Pimpinan Rp. 550.000.000 - Kendaraan Patroli (Single Cabin) 450.000.000 - Kendaraan Mobil Damkar Rp. 1.700.000.000 - Perlengkapan Pakaian dan Peralatan Merching Band Rp. 150.000.000
TOTAL					Rp20,554,301,000		

KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI GORONTALO


TAUFIK EL. HAKIM SIDIKI, SE, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196809141997031005